

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Th 1999 dan telah di sempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Otonomi Daerah, sepertinya program nasional tersebut tidak lagi dibiarkan hanya sebagai pelengkap yang hanya menerus dilewatkan tanpa evaluasi dan realisasi nyata. Saat ini pemerintah Indonesia benar-benar bertekad untuk mewujudkan sistem desentralisasi tersebut. Optimalisasi pembangunan segala sektor dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Setiap daerah dioptimalkan menggali, mengolah dan mengusahakan sendiri potensi dan sumber-sumber ekonomi daerahnya masing-masing, Hal ini mempunyai tujuan agar tiap daerah dapat lebih mandiri dan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Walaupun hal tersebut tidak mudah dilakukan, tetapi pada hakekatnya sudah saatnya tiap daerah menopang kegiatan pembangunan dengan kemampuan sendiri, mengingat potensi yang ada sangat memungkinkan tiap daerah untuk melakukan hal tersebut.

Pada dasarnya pembangunan dilaksanakan agar taraf hidup masyarakat dan kesejahteraannya dapat lebih baik dan terbebas dari kemiskinan dan segala tekanan dari keadaan sekitarnya. Dengan demikian kebijaksanaan yang tepat adalah dengan sistem pembangunan yang mengikut sertakan seluruh kemampuan rakyat. Dan

partisipasi rakyat yang secara langsung maka akan didapat balas jasa pembangunan yang secara langsung pula oleh masyarakat, walaupun dalam kondisi real potensial sumber daya manusia tiap daerahnya pastilah berbeda baik dalam hal kemampuan maupun profesionalisme dalam keikutsertaannya dalam pembangunan. Pemerintah daerah harus memiliki kebijaksanaan yang benar-benar merakyat untuk mengatasi masalah-masalah ini, contohnya untuk daerah yang latar belakang pendidikan dan kemampuan nya yang kurang hendaknya pemerintah daerah mengambil kebijaksanaan yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja yang besar.

Salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah mengembangkan industri pariwisata adalah salah satu potensi sumber daya yang cukup menjanjikan untuk sumber pendapatan daerah karena secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja yang cukup besar, selain itu baik tenaga kerja formal maupun informal sangat diperlukan untuk industri pariwisata. Disamping itu sektor pariwisata juga menciptakan tenaga kerja di bidang-bidang yang tidak langsung berhubungan dengan pariwisata, yang terpenting di bidang kontruksi bangunan dan jalan. Banyak bangunan yang didirikan untuk hotel, rumah makan, toko-toko, dan jalan-jalan harus dibuat dan ditingkatkan kondisinya.

Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagian bagian dari pembangunan nasional, mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan Nasional dilaksanakan secara

menyuluruh. Pembangunan dibidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap Pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya.

Pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan yaitu, pendapatan asli daerah dan subsidi pemerintah pusat. Subsidi pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum indonesia. Sementara itu pendapatan asli daerah didapatkan melalui pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penghasilan dari perusahaan daerah, dan penghasilan daerah legal lainnya.

Salah satu pajak yang memberikan kontribusi penting untuk pendapatan asli daerah di kabupaten/ kota di indonesia adalah sektor pariwisata. Pengembangan

sektor pariwisata akan meningkatkan penerimaan daerah dimana kepariwisataan memiliki komponen terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat rencana besar pembangunan destinasi wisata kelas dunia dengan menertbitkan peraturan daerah no. 15 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2025 membagi provinsi Jawa Barat menjadi 5 destinasi provinsi (DPP) yaitu destinasi pariwisata karawang-bekasi dan sekitarnya dengan pusat DPP Kabupaten Bekasi, destinasi Pariwisata Cirebon Raya dan sekitarnya dengan pusat DPP adalah Kota Cirebon, destinasi pariwisata Cekungan Bandung dan sekitarnya dengan pusat DPP Kota Bandung, destinasi pariwisata Bogor,Cianjur,Sukabumi yaitu pusat DPP Kota Bogor, dan destinasi pariwisata Jawa Barat Selatan dan sekitarnya berpusat DPP yaitu Kabupaten Pangandaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat menuliskan dalam Tematik Sektor CG 7 disebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu kegiatan prioritas untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Adapun tujuan tersebut sesuai dengan rencana Pemerintah yang berbunyi “pengembangan destinasi wisata tiap kunjung dan destinasi wisata dunia”

Pendapatan Sektor Pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang cukup potensail melihat banyaknya objek wisata yang dapat dikembangkan untuk yang optimal, walau pada kenyataannya sektor pariwisata masih belum dikelola secara maksimal karena kurangnya kesadaran bahwa pengaruh dan

kontribusi pendapatan pariwisata terhadap pendapatan asli daerah sebagai sumber perdanaan untuk pembangunan daerah.

Tabel 1.1

Pendapatan Sektor Pariwisata Jawa Barat, D.I Yogyakarta Dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Sektor Pariwisata Jawa Barat, D.I Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (Rupiah)		
		Jawa Barat	D.I Yogyakarta	Nusa Tenggara Timur
1	2018	1.931,400,790,520	475.320,932,101	28.522,597,166
2	2019	3.281,099,470,550	606.468,910,587	60.830,907,435
3	2020	1.366,760,461,801	285.748,213,791	36.270,945,292

Sumber : OPEN DATA JABAR, Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor Wisata Di Jawa Barat, Tahun 2018-2020, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Data Kepariwisataaan 2020, Badan Keuangan Daerah NTT 2020 (Diolah).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Sektor Pariwisata di Jawa Barat yang paling tinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.281.099.470.550 dan di Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar Rp. 606.468.910.587 karena pada tahun 2019 penyebaran virus corona belum masuk ke Indonesia. Dan pada tahun 2019 yang paling tertinggi di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 60.830.907.435.

Pendapatan sektor pariwisata terendah di Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.366.760.461.801 dan pendapatan sektor pariwisata di Yogyakarta sebesar Rp. 285.748.213.791 lalu Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 360.270.945.292 sangat turun signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penyebaran Covid-19, anjloknya pendapatan sektor

pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak dari pandemi Covid-19.

Wisatawan adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (*tourist*), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu dengan kurang dari 24 jam maka mereka disebut pelancong (*excursionist*).

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten/Kota Jawa Barat
Tahun 2018- 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata		
	2018	2019	2020
Bogor	4.411.967	2.696.467	1.764.888
Sukabumi	1.494.205	164.233.00	565.822.00
Cianjur	901.852.00	4.484.187	1.046.795
Bandung	161.000.00	2.490.261	1.836.675
Garut	67.897.00	2.851.809	357.324.00
Tasikmalaya	357.00	1.449.404	590.908.00
Ciamis	110.997.00	697.817.00	701.273.00
Kuningan	338.738.00	358.911.00	2.215.621
Cirebon	186.776.00	260.357.00	246.466.00
Majalengka	23.260.00	701.335.00	472.906.00
Sumedang	122.419.00	175.945.00	648.004.00
Indramayu	31.632.00	1.430.072	411.918.00
Subang	2.482.798	1.080.895	3.176.632
Purwakarta	357.349.00	2.081.608	685.318.00
Karawang	316.471.00	9.453.886	1.800.393
Bekasi	2.043.000	11.682.00	1.730.651
Bandung Barat	121.788.00	5.440.158	2.202.146
Pangandaran	3.578.00	3.227.296	3.604.128
Kota Bogor	8.325.00	3.956.432	1.302.719
Kota Sukabumi	200.445.00	-	725.48
Kota Bandung	5.864.721	2.442.250	393.223.00

Kota Cirebon	214.340.00	9.973.70	751.819.00
Kota Bekasi	908.450.00	15.00	698.09
Kota Depok	34.687.00	1.275.00	1.633.958
Kota Cimahi	4.194.00	15.875.00	295.33
Kota Tasikmalaya	228.573.00	695.678.00	195.699.00
Kota Banjar	38.007.00	107.260.00	33.900.00
Provinsi Jawa Barat	20.713.169	47.272.478	28.541.076

Sumber : BPS, Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata 2018-2021

Berdasarkan tabel 1.2 Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 di Jawa Barat adalah sebesar 28.541.076 Jiwa. Mengalami penurunan di bandingkan tahun 2019 sebesar 47.272.478 Jiwa karena sektor industri pariwisata adalah sektor yang paling terdampak covid-19 terjadi dan jumlah rencana pembangunan yang menjadi program strategis akan dilanjutkan pada tahun 2021.

Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat (Disparbud Jabar) menyatakan kunjungan wisatawan baik lokal dan mancanegara ke objek wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat turun hingga 80 persen akibat pandemi COVID-19.

Pada akhir oktober 2020 memberikan dampak positif terhadap tingkat kunjungan wisatawan di Jawa Barat sekaligus menggerakkan sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, kunjungan wisatawan ke Jabar pada libur panjang naik signifikan. Bahkan sepanjang oktober 2020, sektor pariwisata kembali membaik meskipun adanya covid -19.

Adapun PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun

tertentu. Semakin tinggi pendapatan perkapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Pendapatan Perkapita Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 29.494.358.76 pada tahun 2020.

Tabel 1.3
Pendapatan Perkapita Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Wilayah Jawa Barat	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)		
	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	29.161.391.20	30.247.470.83	29.494.358.76
Bogor	25.373.345.99	26.296.550.30	25.310.591.99
Sukabumi	17.935.085.48	18.922.738.58	18.702.513.57
Cianjur	13.411.219.92	14.128.884.21	14.039.069.25
Bandung	20.877.714.63	21.809.416.71	21.095.968.71
Garut	14.281.947.98	14.907.060.03	14.639.157.88
Tasikmalaya	13.315.811.21	14.016.644.43	13.866.961.30
Ciamis	17.587.558.79	18.431.492.30	18.283.002.94
Kuningan	14.724.987.57	15.599.976.46	15.526.975.77
Cirebon	14.778.053.62	15.378.654.31	15.072.409.88
Majalengka	16.622.647.32	17.724.741.83	17.953.616.37
Sumedang	19.581.738.59	20.773.419.58	20.499.335.30
Indramayu	33.904.384.24	34.802.100.70	34.069.512.34
Subang	17.353.373.91	17.904.496.80	17.519.828.26
Purwakarta	46.511.036.04	48.071.784.07	46.643.853.89
Karawang	67.363.090.00	69.563.074.69	66.589.465.44
Bekasi	66.636.076.33	66.965.638.49	62.373.478.74
Bandung Barat	17.751.792.37	18.470.748.79	17.866.315.49
Pangandaran	18.417.680.90	19.412.058.18	19.275.474.89
Kota Bogor	27.728.663.56	29.000.137.65	28.469.912.41
Kota Sukabumi	25.158.551.17	26.346.398.47	25.803.658.11
Kota Bandung	73.924.026.21	78.808.425.71	76.947.023.29
Kota Cirebon	50.012.014.82	52.653.542.61	51.641.318.63
Kota Bekasi	22.458.187.79	23.104.659.98	21.991.181.97
Kota Depok	19.730.607.31	20.390.600.10	19.375.401.90
Kota Cimahi	34.867.094.93	36.857.694.67	36.010.338.19

Kota Tasikmalaya	22.421.475.77	23.731.278.46	23.238.470.76
Kota Banjar	16.775.232.92	17.589.170.26	17.757.544.45

Sumber : BPS Provinsi Jabar, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kab/Kota 2018-2020 (diolah)

Pada tabel 1.3 Pendapatan Perkapita Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar Rp. 29.494.358.76. Pendapatan Perkapita Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menurun karena adanya pandemi virus corona covid-19. Banyak warga jawa barat yang harus kehilangan pendapatannya karena pemberlakuan pembatasan sosial demi meredam penularan corona.

Pendapatan per kapita Jawa Barat itu pun setara dengan US\$ 2.964.5 pada tahun lalu. Jika mengacu kepada penggolongan yang dilakukan Bank Dunia, maka jawa barat masuk ke dalam kategori wilayah dengan pendapatan menengah bawah.

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar yang terjual, jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu dijual (Austriana. 2005). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotek tersebut nyaman untuk disinggahi.

Tabel 1.4

**Tingkat Penghunian Kamar Hotel Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2020**

Kabupaten/Kota	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Jawa Barat Tahun 2017-2020 (Persen)		
	2017	2018	2019
Bogor	24.40	25.25	30.38
Sukabumi	17.66	21.61	20.60
Cianjur	25.55	25.12	25.61
Bandung	43.21	50.28	32.92
Garut	26.95	24.92	23.93
Tasikmalaya	26.03	20.80	15.53
Ciamis	33.86	35.63	35.63
Kuningan	33.42	26.09	35.12
Cirebon	46.88	43.29	50.05
Majalengka	32.07	24.03	18.96
Sumedang	44.28	38.01	37.23
Indramayu	77.58	50.38	41.97
Subang	40.88	31.89	39.10
Purwakarta	42.29	35.09	40.18
Karawang	46.35	50.19	51.32
Bekasi	43.60	43.52	46.15
Bandung Barat	23.95	28.31	27.41
Pangandaran	14.61	18.44	15.51
Kota Bogor	78.08	70.34	58.88
Kota Sukabumi	38.88	40.65	51.64
Kota Bandung	64.87	63.72	59.05
Kota Cirebon	56.15	58.53	55.47
Kota Bekasi	67.23	60.59	57.06
Kota Depok	57.38	67.84	62.42
Kota Cimahi	64.92	64.45	55.72
Kota Tasikmalaya	54.57	41.38	41.58
Kota Banjar	27.85	31.17	27.42

Sumber : BPS. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Jawa Barat 2017-2019.

Pada tabel 1.4 tingkat hunian hotel tertinggi di Kabupaten/Kota pada tahun 2019 adalah Kota Depok 62.42% hal ini turun karena tahun 2018 sebesar 67.84%. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menyebutkan okupansi atau tingkat hunian hotel Depok turun dikarenakan akibat wabah penyebaran virus corona. Tingkat hunian hotel terendah di Kabupaten/Kota pada tahun 2019 adalah Kabupaten Tasikmalaya sebesar 15.35% hal ini turun karena tahun 2018 sebesar 18.44%.

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar yang terjual, jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Austriana. 2005). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Para wisatawan akan merasa lebih aman, nyaman, dan betah untuk ditinggal lebih lama di daerah tujuan wisata.

Industri terutama kegiatan yang berkaitan penginapan akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan itu menginap lebih lama. Widiyanto (2012) Menurut Dinas Pariwisata hotel merupakan bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaram. Fungsi hotel bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan ketenangan.

Tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, karena banyak hotel-hotel dan villa-villa di daerah tujuan wisata menerapkan pelayanan yang maksimal kepada para wisatawan yang berkunjung, kualitas dan pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola hotel terjamin, sehingga wisatawan yang berkunjung akan betah untuk berlama-lama tinggal di daerah tujuan wisata.

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Hasil penelitian dari Windriyaningrum (2013) memperoleh hasil bahwa jumlah kamar hotel atau tingkat hunian hotel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan sektor pariwisata. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Swastika dan Mahendra Yasa (2017) yang menyatakan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang mana pendapatan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang pendapatan utama, sektor pariwisata di Jawa Barat diharapkan bisa memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan. Pendapatan**

Perkapita Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2010-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan. maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan per kapita dan tingkat hunian kamar hotel terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2010-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan perkapita dan tingkat hunian kamar hotel terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2010-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan perkapita dan tingkat hunian kamar hotel terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2010-2020.
2. Mengetahui pengaruh perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. pendapatan perkapita dan tingkat hunian kamar hotel terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2010-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi pada kajian ilmu ekonomi yang sejenisnya berkaitan dengan pendapatan sektor pariwisata serta memberikan sumbangan pengetahuan, terkait dengan pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan per kapita dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan sektor pariwisata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan pembelajaran untuk di sempurnakan pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan.